

# **Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Efektifitas Pengawasan Anggaran (Studi Empiris Pada Kabupaten Kampar)**

**Oleh : Aras Aira  
Dosen Fekonso UIN Suska**

## **Abstract**

*The research sought to test the effect of knowledge of the budget on the budget supervision effectivity. Dependent variables in this research is knowledge of the budget, Independent variable is the budget supervision effectivity. The population of the research was the members of parliament serving for the period of 2009-2014. The data were collected using a questionnaire to 43 members of parliament, however only 34 questionnaires were returned. The result revealed that the knowledge of the budget had sufficient effect on the budget supervision effectivity.*

**Keyword : Knowledge Of The Budget, And The Budget Supervision Effectivity**

## **Pendahuluan**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD, pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001)

Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan adalah untuk; (1) anggaran yang disusun benar-benar dijalankan; (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan dewan harus bersifat efektifitas, yang berarti tercapainya nya tujuan yang direncanakan yaitu melakukan pengawasan terhadap anggaran, Menurut Steer dalam Dewi (2011) efektifitas adalah “mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi.” Setiap organisasi didirikan atau dibentuk untuk mengejar efektifitas, karena eksistensi dan pertumbuhan yang bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat ketangguhan yang tinggi.

Dalam melakukan pengawasan anggota di pengaruhi oleh beberapa hal., Parmono (2002) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ada 2 faktor yang akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan dewan, pertama faktor internal, yang terdiri dari pengetahuan dewan tentang anggaran, latar belakang politik, keahlian, dan pengalaman. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu akuntabilitas, transparansi.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. Hasil penelitian Werimon (2005) menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Indriani dan Baswir (2003) mengenai pengaruh pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Hasil penelitian Sopanah (2007), Indaradi (2001), Coryanati (2007), Elina (2008) dan Setyawati (2010) juga menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan DPRD.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. EFEKTIFITAS PENGAWASAN ANGGARAN**

#### 1. Pengertian Efektifitas Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan (Revrison, 1999). Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan dan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang, 1998).

Keputusan presiden RI No.74 tahun 2001 pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Peraturan pemerintah No.105 tahun 2000 (tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara) pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk mencapai pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

### **B. PENGETAHUAN ANGGOTA DPRD TENTANG ANGGARAN**

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Sedangkan Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak.

Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan.

Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah Pasal 34 ayat (3 dan 4) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD

(KUA) kepada DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tersebut selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Pada tahap inilah peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota dewan harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang anggaran secara keseluruhan serta menambah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.

Yudoyono (2000) mengatakan bahwa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, DPRD seharusnya tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang politik, tetapi juga pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme kerja DPRD, kebijakan publik, konsep dan teknik pemerintahan, teknik pengawasan, dan sebagainya. Dalam lingkup pengawasan terhadap anggaran maka pengetahuan yang spesifik tentang anggaran akan mempengaruhi kinerja bagi pihak yang melakukan pengawasan, yaitu tingkat efektivitas pengawasan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tersebut. Semakin luas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis utama sebagai berikut :

HI: Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan anggaran

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan maka model penelitian dapat ditunjukkan oleh gambar dibawah ini :

## METODE PENELITIAN

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Nur Indriantoro,2002). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar Dengan menggunakan metode sensus, Alasan dipilihnya sampel tersebut adalah karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan, dan pengawasan terhadap anggaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di lingkungan DPRD Kabupaten Kampar. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengantar langsung kuesioner ke responden, demikian pula pengembaliannya diambil sendiri ke responden sesuai dengan yang dijanjikan

### Defenisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

Untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, variabel-variabel yang diteliti perlu diukur. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

#### 1. Variabel Independen

Variabel Independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Nur Indriantoro,2002), dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan dewan tentang anggaran.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini.

Instrumen pengukuran pengetahuan anggaran dilakukan dengan menanyakan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang RAPBD/APBD dalam konteks anggaran yang berbasis kinerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan. Yang merupakan kuesioner yang digunakan oleh peneliti terdahulu. Seluruh item pertanyaan diberi skor dari 1 sampai dengan 5 skala Likert

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel independen (Nur Indriantoro, 2002), Variable dependen pada penelitian ini adalah efektifitas pengawasan anggaran yang dilakukan DPRD. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif dalam hal ini adalah DPRD, untuk mengawasi anggaran. Fungsi pengawasan hendaknya dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001).

## METODE ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *simple regression* yaitu berdasarkan nilai *P Value*, dan *R square*, adapun untuk menganalisis data digunakan *software SPSS for window released 17 programe*. adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a_1 + b_1 \cdot X_1 + e \dots \dots \dots$$

Keterangan : Y = Efektifitas pengawasan

X<sub>1</sub> = Pengetahuan dewan tentang anggaran.

a<sub>1</sub> = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi

## PENGUJIAN KUALITAS DATA

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Selain itu perlunya dilakukan pengujian ini karena instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan instrument yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Robinson (2006) dan modifikasi yang dilakukan oleh penulis.

### Uji Realiabilitas

Uji realibilitas adalah alat mengukur sesuatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Imam Gozali, 2006). Metode yang digunakan untuk uji ini adalah menghitung cronbach alpha untuk menguji kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,6 (Nunnally, 1967 dalam Imam Ghozali, 2005).

### Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur kualitas instrumen yang digunakan, dan menunjukkan tingkat kevaliditan atau kesahihan suatu instrumen, serta seberapa baik suatu konsep dapat didefinisikan oleh suatu ukuran (Hair et al., 1998). Instrumen dikatakan valid jika sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Pengujian Validiatas dapat dilakukan dengan menggunakan correlation person, dengan melihat korelasi antara variable konstruk yang menunjukkan signifikan, jika total skor konstruk menunjukkan signifikan < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indicator pertanyaan adalah valid (Imam Ghozali, 2006)

### Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normal atau tidaknya model regresi dapat menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Dari hasil peneliti terdahulu diketahui bahwa nilai Kolmogorov- Smirov adalah 1.079 dan signifikan pada 0.195 hal ini berarti *p-value* nya lebih besar dari *confidence interval* (0.05) dan ini menunjukkan data residual terdistribusi normal. (Ghozali, 2005).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Jumlah kuesioner yang terkumpul yaitu sebanyak 37 eksemplar dari total 43 eksemplar yang disampaikan. Jadi response rate responden dalam penelitian ini sebesar 86,4%. Dari kuesioner yang terkumpul, terdapat 3 eksemplar yang tidak dianalisis dikarenakan kuesioner tersebut tidak dijawab dengan lengkap, dengan demikian jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 34 eksemplar (79,07%). Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Tingkat Pengembalian Kuesioner

*Sumber: Pengolahan data primer, 2011*

## PROFIL RESPONDEN

Data demografi responden berikut ini menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

*Sumber : Pengolahan data primer, 2011*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa anggota DPRD yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas adalah laki-laki yakni 91,2% sedangkan sisanya sebesar 8,8% adalah perempuan. Usia responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas berada dalam dua kelompok yakni responden dengan usia 31 – 40 tahun sebesar 32,3% dan usia 41 – 50 tahun sebanyak 50 %.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar responden berada dalam dua kelompok yakni yang berpendidikan SLTA/ sederajat sebesar 38,3% dan responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 52,9%. Selanjutnya, sebagian besar responden dalam penelitian ini belum pernah menjadi anggota DPRD sebelumnya (76,5%), hanya 23,5% sisanya dimana responden pernah menjadi anggota DPRD pada periode-periode sebelumnya.

## STATISTIK DESKRIPTIF

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (kejelasan anggaran, keakuratan anggaran, evaluasi anggaran, pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan anggaran) digunakan tabel statistik deskriptif sebagai berikut :

### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

*Sumber : Pengolahan data primer,2011*

Berdasarkan data deskriptif diatas dapat dilihat bahwa, pada variabel pengetahuan anggaran menurut responden sudah bagus, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata untuk pengetahuan sebesar 40.0882 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dari setiap pernyataan dari pengetahuan anggota dewan tentang APBD. Untuk variabel efektifitas pengawasan anggaran, menunjukkan bahwa menurut responden APBD tahun 2010 di Kabupaten Kampar cukup efektif.

## HASIL UJI KUALITAS DATA

Hasil pengujian realibilitas data dapat dilihat dari tabel berikut :

### Hasil Pengujian Realibilitas

*Sumber : pengolahan data primer,2011*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari hasil pengujian reliabilitas untuk semua instrumen diperoleh nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.6 yaitu 0.754-0.878. Hal ini berarti bahwa jawaban responden terhadap setiap pertanyaan reliabel dan konsisten. Sehingga layak digunakan dalam penelitian ini.

## Uji Validitas

Uji Validitas menggunakan korelasi Pearson, Instrumen dikatakan valid jika sudah mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Pengujian Validitas dapat dilakukan dengan menggunakan *correlation person*, dengan melihat korelasi antara variabel konstruk yang menunjukkan signifikan, jika total skor konstruk menunjukkan signifikan  $< 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Imam Ghazali,2006) hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Hasil pengujian validitas

*Sumber : Pengolahan data primer,2011*

Keterangan :

P.1 = Pertanyaan 1, P.2 = Pertanyaan 2, P.3 = Pertanyaan 3  
P.4 = Pertanyaan 4, P.5 = Pertanyaan 5, P.6 = Pertanyaan 6  
P.7 = Pertanyaan 7, P.8 = Pertanyaan 8, P.9 = Pertanyaan 9  
P.10 = Pertanyaan 10

Dengan melihat tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing pertanyaan pada setiap variabel memiliki signifikansi yang berkisar antara 0.000-0.004 kecil dari 0.05 hal ini berarti bahwa disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan valid, sehingga bisa digunakan untuk mengukur setiap variabel. Hal ini berarti bahwa setiap pertanyaan mampu mengukur apa yang diinginkan.

### **Hasil Uji Normalitas**

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof-Smirnof Test* pada *alpha* sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorof-Smirnof Test* lebih besar dari 0,05 berarti data normal. Ringkasan hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut ini :

#### **Hasil Pengujian Normalitas**

*Sumber : Pengolahan data primer, 2011*

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa *asympt.sig (2-tailed)* nilai probabilitas masing-masing variabel berkisar antara 0.222-0.952 > 0.05, hal ini berarti bahwa residual terdistribusi normal.

### **HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

#### **Hasil Pengujian Hipotesis**

*Sumber : hasil pengolahan data, 2011*

Berdasarkan analisis dari tabel diatas memperlihatkan model persamaan regresi yang signifikan pengaruh Pengetahuan terhadap Efektivitas Pengawasan, di mana nilai  $F=9.898$  dengan  $p<0.05$ . Adapun model persamaan regresi ini, variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memberi pengaruh sebesar 23.6 % terhadap Efektivitas Pengawasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menerima H1. Penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawan keuangan daerah. . Dimana untuk meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshopworkshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan

daerah demi meningkatkan kualifikasi yang optimal. Indriani (2002) berpendapat sama dengan penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan begitu juga dengan penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah menurut sampel anggota Dewan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Coryanati (2007), Erlina (2008), dan Setyawati (2010) yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan fungsinya sebagai pihak yang mengawasi APBD, anggota dewan dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan dewan tentang anggaran, agar pengawasan dapat dilakukan dengan efektif.

Merujuk Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang tugasnya. Pengetahuan anggaran juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan juga dengan Indri (2001), Syamsiar (2001), dan Sutamoto (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja dewan salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Serta Yudoyono (2000) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tingkat pendidikan seorang politik akan berpengaruh terhadap kemampuan memahami permasalahan baik secara teknis maupun non-teknis. Semakin tinggi pendidikan seorang politikus maka semakin baik pula kecakapan berpolitiknya. Untuk pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran secara individu terhadap tahap-tahap pengawasan keuangan daerah hanya berpengaruh pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.

Hal ini mungkin dikarenakan pada tahap perencanaan anggota Dewan mempunyai peranan penting dalam memberikan legitimasi tentang RAPBD yang telah disusun. Dalam pemberian legitimasi tersebut pengawasan keuangan daerah dilakukan secara langsung. Anggota Dewan dapat mengetahui rencana anggaran yang diajukan apakah relevan atau tidak.

Pada tahap pertanggungjawaban pengetahuan Dewan tentang anggaran secara langsung dapat mendeteksi adanya suatu kebocoran dan pemborosan anggaran yang terjadi dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban, laporan perhitungan APBD, dan Nota perhitungan APBD. Sedangkan pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pengamatan dan mempelajari pendapat masyarakat. Dewan hanya memastikan apakah APBD yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik.

Menurut Marbun (1982) ketidaksempurnaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan disebabkan karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh rata-rata anggota DPRD dibandingkan dengan pihak eksekutif dan adanya perasaan cepat puas yang dimiliki oleh anggota DPRD. Akibatnya Dewan jarang melakukan peninjauan dilapangan. Biasanya dalam peninjauan tersebut DPRD dapat mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif dan Dewan dapat memberikan saran-saran untuk perbaikan atau sumbangan pikiran lainnya secara mendadak atau periodik kepada aparat alat pemerintahan daerah. Demi mencapai tingkat fungsional yang memadai maka setiap anggota DPRD harus membenahi diri dan mengkaji ulang posisi dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu., demi meningkatkan citra DPRD dimasyarakat maka DPRD dituntut untuk bekerja lebih keras dan mempunyai keluaran (output) baik kualitatif maupun kuantitatif memenuhi persyaratan yang ada.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap efektifitas pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi wilayah pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel personal background, political background. Dan variabel yang lain yang ikut mempengaruhi anggota dewan dalam melakukan pengawasan..
3. Bagi anggota dewan khususnya komisi yang membidangi keuangan dan sebagai panitia anggaran hendaknya melaksanakan program pemberdayaan bagi para anggota dewan dalam bidang keuangan baik melalui pelatihan, workshop maupun kegiatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah.1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*. Tesis Program Pasca Sarjana MAP Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Anthony, R.N. dan V. Govindarajan.2004. *Management Control Systems*, Eleventh Edition, McGraw-Hill Companies, Inc, U.S.A
- \_\_\_\_\_, J Dearsen dan V. Govindarajan. 1992. *Management Control Systems*, Seventh Edition, Chicago: Richard D. Irwin
- \_\_\_\_\_, dan Reece, J S. 1989. *Accounting Text and Cases*, 8th Edition, Homewood: Richard D Irwin Inc.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),2009,*Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik*.Seri Penguatan Legislatif.Jakarta.
- Basuki Rachmat. 2001. *Penataan Mekanisme dan Kelembagaan Pengawasan APBD oleh DPRD dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Dalam Abdul Halim. 2004.Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YPKN. Yogyakarta.
- Chow C.W, Jean C.C, dan Wlliams S.W. 1988. *Participative Budgeting: Effects of a Truth-Inducing Pay Scheme and Information Asymmetry on Slack and Performance*. The Accounting Review. Vol. LXIII, No.1, January. pp.111-122
- Coryanatin, Isma. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan Keuangan Daerah*.Jurnal Akuntansi ke X. Juli.Makasar.
- Dewi,Mustika Indah.2010.*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.Tesis UNDIP.Tidak Dipublikasikan.
- Erlina. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dan Kinerja Dewan : Peranan Partisipasi Masyarakat*.Jurnal Wawasan. Vol.3,Februari. Malang
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair, Joseph F, et al. 1998. *Multivariate Data Analysis*, 5th Edition, Prentice-Hall, Inc.
- Hansen, Don R. dan M.M. Mowen. 2003. *Management Accounting*. 6th Edition, South-Western College Publishing
- Hanson, E.I. 1996. *The Budgetary Control Function*. *The Accounting Review*. April, hal. 239-243
- Indradi, Syamsiar,2001. *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman Anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Tesis Universitas Brawijaya. Malang.
- Indriani, Rini. 2002. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran dan RPPs (Rules, Procedures, and Policies) terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Koontz, Harold et al. 1984. *Principles of Management*. McGraw-Hill. Inc
- .Lock E.K, Shaw LM, Saari, Garry, 1981. *Goal Setting and Task Performance: 1969-1980* . *Psychological Bulletin*, P. 1969-1980
- Lowe, E. 1970. *A Budgetary Control: An Evaluation in Wider Managerial Perspective*. *Accountancy*, November. pp. 765
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 3, Agusuts, hal.441-456
- \_\_\_\_\_. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi , Yogyakarta.

*Aras Aira: Pengaruh Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Efektifitas...*

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*, BPFE Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Citra Umbara, Bandung
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Citra Umbara, Bandung.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Citra Umbara, Bandung.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Revrison, Baswir. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE Yogyakarta.
- Robinson.2006. *Pengaruh kualitas Anggaran terhadap efektifitas pengawasan keuangan daerah : dengan Pengetahuan Dewan sebagai Variable Moderating*. Tesis Pasca Sarjana UNDIP. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Salim, P dan Salim, Y.1991. *Kamus Bahasa Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Schermerhorn, John R.2001. *Management*, Willey.
- Setyawati, Yuni. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Dewan terhadap Pengawasan Keuangan*

*Daerah oleh DPRD.*

- Tesis Pasca Sarjana Sebelas Maret. Surakarta. Tidak Dipublikasi.  
Sopannah, 2003, *pengaruh partisipasi masyarakat dan Transparansi Kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.*  
Tesis Program Pasca  
Sarjana UGM. Yogyakarta, tidak dipublikasikan.
- Schiff, M., dan A.Y Lewin. 1970. *The Impact of People on Budgets.* The Accounting Review. April. pp. 259-268.
- Stoner, James A.F. 1982. *Management 2nd Edition.* Prentice-Hall
- Syahrudin & Werry DT. 2002. *Peranan DPRD untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah tentang Pelaksanaan Desentralisasi.* Pusat Studi Kependudukan Universitas Andalas, Padang.
- Swieringa, R.J dan R.H Moncur. 1975. *Some effects of Participative Budgeting on Managerial Behavior.*  
National Association of Accountants.
- Werimon, Simson. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan dengan Pengawasan DPRD.*  
Jurnal Akuntansi ke X.  
Juli. Makasar.
- Winarna, Jaka dan Murni. 2006. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah.* Jurnal Akuntansi ke X. Juli. Makasar.
- Witono, Banu. 2003. *Optimalisasi Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, jurnal akuntansi dan keuangan,* vol. 2:151-168
- Yudoyono, Bambang. 2002. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,* Available At. <http://www.depdagri.go.id>